

Partai Politik, Kepala Daerah Dan Performa Ekonomi Regional (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014)

Rudy Prasetyawan Sulistiyana¹

Bhimo Rizky Samudro²

Yogi Pasca Pratama³

1. Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

rudyppp@ymail.com, bhimosamudro@yahoo.com, yogipasca@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of governor selected as result elections to regional economic performance and see comparison economic performance of political parties within the scope of regional (province) toward economic performance of political parties within the scope of national in entire of Indonesia.

The analytical method used in this research were quantitative method with a comparative analysis of average with statistical inference be paired sample t-test and economic performance index. Variables used in this research were economic growth, inflation, unemployment rate, unemployment, poverty, poverty level, inequality, regional head and dominance political parties in a province. Population of study includes 33 provinces in Indonesia from 2010-2014.

The results of this study are : 1) there is no difference in the performance of regional head incumbent and non-incumbent from perspective of economic performance and 2) performance of political parties at the provincial level from 2010-2014 has not been satisfactory in building a welfare society in the field of economy through policy making.

Keyword : *Regional Head Incumbent, Regional Head Non-Incumbent, Political Parties, Economic Performance Index, Paired Sample T-Test*

JEL Classification: *O18, P47*

1. PENDAHULUAN

Sektor ekonomi makro merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan suatu negara baik negara maju atau negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat beberapa indikator ekonomi untuk menilai kinerja perekonomian suatu wilayah seperti kurs, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan lain-lain. Pemerintah mengutarakan bahwa proritas ekonomi tahun 2016 antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, penyerapan tenaga kerja, kesenjangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem perekonomian yang mengizinkan adanya peran pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan kondisi perekonomian sehingga pemerintah di Indonesia mempunyai kuasa untuk mengatur perekonomian negara secara umum. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) memaparkan tentang tiga fungsi pemerintah dalam sebuah ekonomi pasar, yaitu : 1) meningkatkan *efisiensi* dengan menciptakan persaingan, mengendalikan eksternalitas seperti polusi dan menyediakan barang-barang publik, 2) memajukan *keadilan* dengan

menggunakan pajak dan program-program pengeluarannya untuk mendistribusikan kembali pendapatan pemerintah kepada kelompok-kelompok khusus dan 3) membantu *stabilitas* dan pertumbuhan makroekonomi seperti mengurangi pengangguran dan inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan regulasi moneter.

Peran pemerintah tersebut diwujudkan dengan membuat suatu peraturan atau program untuk mengatur pola perekonomian yang diharapkan. Peran pemerintah tersebut sebagai akibat dari keberadaan pemerintah sebagai representasi dari perwujudan kekuasaan yang terdapat di suatu wilayah. Pembagian kekuasaan di Indonesia menganut sistem *trias politika* yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang ketiganya berperan dalam mengatur dan mengendalikan. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang pembagian kekuasaan (*distribution of power*) antara lembaga-lembaga negara di Indonesia. Pembagian kekuasaan tersebut bukan bermaksud untuk membuat pemerintahan menjadi kaku dan tajam namun lebih bermaksud untuk menjalin koordinasi antara lembaga satu dengan lembaga lain. Karena fungsi koordinasi tersebut, masing-masing lembaga tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda.

Keberadaan ketiga lembaga tersebut tidak akan lepas dari istilah partai politik karena dari ketiga lembaga tersebut, dua lembaga yaitu lembaga legislatif dan eksekutif berasal dari kader partai politik walaupun tidak menutup kemungkinan lembaga yudikatif juga berasal dari partai politik. Lembaga legislatif dan eksekutif mempunyai kewenangan dalam membuat regulasi-regulasi terutama dalam bidang ekonomi juga menuntut adanya stabilitas politik sehingga partai politik pada masa reformasi menjadi subyek

yang mampu mempengaruhi iklim politik itu sendiri.

Partai politik memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh organisasi lainnya. Peran penting ini mendudukan partai politik di posisi pusat. Meyer (2012) mengutarakan posisi pusat tersebut memiliki dua dimensi tersebut. Antara lain : 1) setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, partai politik kemudian mentransformasikan menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan platform tersebut mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga partai politik akan mendapatkan banyak kursi di parlemen sehingga partai politik akan mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya partai politik harus mempengaruhi proses politik dalam legislatif dan implementasinya program kebijakan publik itu dan 2) partai politik adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional.

Peran partai politik semakin krusial ketika era reformasi (tahun 1998-sekarang) datang. Era Reformasi telah membuat perubahan dalam penanganan suatu daerah yaitu dengan diadakannya kebijakan desentralisasi daerah sehingga membuat peran eksekutif daerah dan legislatif daerah menjadi sangat penting. Desentralisasi merujuk pada reorganisasi wewenang sehingga terdapat sistem tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan keefektifan sistem pemerintahan, peningkatan wewenang dan kapasitas daerah (UNDP dalam Noor, 2012). Pada dasarnya, desentralisasi mencakup aktivitas ekonomi, politik, pembu-

atan keputusan dan seterusnya. Eksekutif dan legislatif harus memiliki kekompakan untuk tujuan bersama dalam membangun daerah masing-masing sesuai dengan tujuan desentralisasi yang mengharapkan terciptanya *good governance* yang sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Dengan pentingnya peran eksekutif dan legislatif semenjak adanya desentralisasi, tentu saja partai politik lebih tergerak untuk menguasai daerah dengan mengutus kader terbaiknya maju dalam pemilihan umum baik untuk memperebutkan tempat di lembaga eksekutif berupa gubernur atau bupati/walikota dan lembaga legislatif berupa kursi DPRD.

Namun sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia masih menghadapi masalah struktur politik dan unsur kepentingan yang bersifat sepihak yang dapat mengganggu kebijakan dan strategi ekonomi untuk rakyat. Dengan faktor tersebut, kepala pemerintahan dan anggota dewan perwakilan rakyat berpotensi membuat kebijakan atau undang-undang yang dapat menimbulkan kontroversi. Seorang kepala daerah tidak mengkehendaki pembuatan kebijakan yang sekiranya merugikan partai politik pengusungnya namun sebenarnya itu baik bagi masyarakat terutama bagi sisi ekonomi. Demikian juga dengan legislator tidak akan berkehendak untuk membuat undang-undang atau peraturan daerah yang sekiranya tidak menguntungkan partai politiknya namun sebenarnya itu baik bagi masyarakat.

Dari kenyataan tersebut, dapat dikatakan setiap perubahan ekonomi dari negara berkembang selalu memerlukan dukungan dari kelompok-kelompok elit, baik melalui persuasif dan paksaan.

Dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung relasi antar kepala daerah, DPRD dan masyarakat terutama sejak diadakannya pemilihan umum secara langsung sejak tahun 2004 semakin dekat. Masyarakat telah memberikan hak pilihnya dan sebagai timbal balik, masyarakat harus menerima dampak dari terpilihnya kepala daerah dan anggota legislatif yaitu salah satunya adalah kesejahteraan ekonomi.

Untuk mengetahui ukuran keberhasilan kader partai politik dalam membangun wilayahnya, perlu adanya pengukuran kinerja partai politik di bidang ekonomi baik dari sisi kepala daerah maupun anggota DPRD Provinsi. Dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memuat tulisan yang berjudul **“Partai Politik, Kepala Daerah Dan Performa Ekonomi Regional (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014)”**. Dari uraian latar belakang, penulis berniat mengangkat dua permasalahan. Yaitu 1) bagaimana fenomena pergantian kepala daerah terhadap performa ekonomi daerah? 2) bagaimana dinamika partai politik terhadap performa ekonomi daerah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui implikasi pergantian kepala daerah terhadap performa ekonomi regional. 2) untuk mengetahui implikasi dinamika partai politik terhadap performa ekonomi daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Politik dan Kekuasaan

Isjwara (1995) mengutarakan bahwa politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan. Menurut Weber (*dalam* Soekanto, 1982), kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini. Max Weber mengartikan kekuasaan sebagai sebuah kemampuan untuk membuat orang lain berkehendak menerima dan melakukan apa yang menjadi kemauan kita walau mungkin hal tersebut tidak disetujui, bahkan ditentang. Sementara itu Budiardjo (2008) mengutarakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Sedangkan menurut Russe (*dalam* Basari, 2003) mengatakan bahwa kekuasaan dapat didefinisikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan, sehingga kesimpulan kekuasaan itu sebagai suatu konsep kuantitatif. Setiap bentuk kekuasaan itu akan ada yang lebih mendominasi, walau mungkin tak dapat dikatakan bahwa salah satu dari yang berkompetisi lebih berkuasa, namun secara penglihatan dasar akan ada salah satu memiliki kekuasaan yang lebih banyak.

Dari beberapa pengertian kekuasaan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan merupakan suatu alat untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain sehingga orang atau kelompok lain patuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pihak penguasa dengan cara berusaha mendominasi kekuasaan di suatu wilayah.

Sehingga menurut Budiardjo (2008) secara visual, kekuasaan dibagi menjadi dua cara :

- 1) Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya

dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antar beberapa tingkat pemerintahan. Pembagian kekuasaan dapat dilihat dari adanya negara kesatuan, negara federal dan konfederasi bahwa ada pemerintahan pusat dan daerah di negara kesatuan atau pemerintah federal dan negara bagian di negara federal.

- 2) Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal *trias politika*.

Partai Politik

Kekuasaan dalam negara Indonesia dibagi menjadi tiga. Yaitu lembaga eksekutif yang ditempati oleh presiden untuk cakupan nasional dan gubernur dan bupati/walikota untuk cakupan daerah, legislatif yaitu DPR untuk cakupan nasional dan DPRD untuk cakupan daerah dan lembaga yudikatif.

Kedua dari ketiga lembaga tersebut (eksekutif dan legislatif) di Indonesia diduduki oleh kader yang berasal dari partai politik sesuai dengan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada jangka waktu tertentu.

Budiardjo (2008) menyampaikan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan tujuan konstitusional untuk melaksanakan programnya. Max Weber (*dalam* Firmanzah, 2008) menyampaikan bahwa tujuan utama keberadaan partai politik untuk membawa pemimpinnya berkuasa

asa dan memungkinkan para pendukungnya mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.

Empat karakteristik dasar partai politik menurut La Palombara dan Weiner (*dalam* Firmanzah, 2008), yaitu : 1) organisasi jangka panjang, 2) struktur organisasi yang didukung dari tingkat lokal sampai nasional, 3) bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya dan 4) mendapatkan dukungan publik yang luas.

Sedangkan fungsi dasar dari sebuah partai politik adalah untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengarahkan pada kepentingan bersama dan merancangannya dalam sebuah legislasi dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah agenda yang bisa mendapatkan dukungan rakyat saat pemilihan umum (Meyer, 2012). Sedangkan dalam menginterpretasikan fungsi partai politik, Budiardjo (2008) membaginya menjadi tiga :

- 1) Sebagai sarana sosialisasi politik
- 2) Sebagai sarana rekrutmen politik
- 3) Sebagai sarana pengatur konflik

Kepala Daerah

Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai rekrutmen politik untuk menyeleksi orang baik untuk internal partai politik dan kepemimpinan nasional dan daerah. Partai politik di dalam pemilihan kepala daerah digunakan sebagai sarana untuk memenangkan calon kepala daerah.

Dalam pencalonan kepala daerah, peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan yaitu memiliki perolehan kursi DPRD sebanyak 15 % dari jumlah kursi DPRD (*Pemilihan Kepala Daerah*, 2011).

Pengertian kepala daerah adalah orang yang diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah yang dipilih da-

lam pemilihan umum. Kedudukan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama tingginya. Contohnya : gubernur, bupati, walikota.

Tugas kepala daerah antara lain :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan di daerah kewenangannya
- 2) Membuat peraturan daerah
- 3) Membuat dan menetapkan APBD
- 4) Pemberian keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sekurang-kurangnya sekali setahun agar DPRD dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Pengukuran Kinerja

Tujuan dari kebijakan fiskal dan kebijakan publik adalah untuk menggalakan pergerakan pembangunan ekonomi suatu daerah seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan dan tingkat ketimpangan. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang membenarkan campur tangan pemerintah dalam penanganan masalah ekonomi, maka harus ada hasil yang dicapai dalam berjalannya suatu organisasi yang dalam hal ini adalah pemerintah dalam menjalankan suatu proses keberlangsungan organisasi.

Dengan adanya fungsi dari kebijakan fiskal dan kebijakan publik sebagai akibat dari kebijakan pemerintah, maka secara otomatis bahwa secara garis besar hasil akhir yang diharapkan dari kebijakan fiskal terdapat pada fungsi tersebut dapat disebut pengukuran kinerja.

Deddy dan Ayuningtyas (2010) mendefinisikan pengukuran kinerja adalah suatu instrumen yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan suatu kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum, pengukuran kinerja menunjukkan hasil dari implementasi dari sebuah ke-

giatan/ kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan kegiatan atau kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian tentang evaluasi kinerja indikator-indikator ekonomi makro yang telah dicapai oleh suatu partai politik sebagai penyedia kader-kader dalam lingkup eksekutif dan legislatif dalam cakupan regional (provinsi) dan mengetahui bagaimana pengaruh pergantian kepala daerah (gubernur) terhadap indikator-indikator ekonomi makro di provinsi se-Indonesia tahun 2010-2014. Daerah yang menjadi obyek penelitian adalah 33 provinsi yang berada di Indonesia dan periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima tahun, yaitu dari tahun 2010-2014. Tahun 2010-2014 dipilih karena tahun tersebut dapat dijadikan pengukuran kinerja dalam perspektif ekonomi dari partai politik tingkat regional (provinsi) hasil dari pemilu legislatif tahun 2009 dan dalam jangka waktu tersebut masing-masing provinsi di Indonesia mengalami satu pemilihan umum kepala daerah (gubernur) kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh peneliti pada objek penelitian. Data ini diperoleh dari informan yang mengerti dalam masalah ekonomi regional yaitu 36 mahasiswa Ekonomi Pembangunan yang pernah mengikuti kuliah Ekonomi Regional dan Perencanaan Pembangunan. Jumlah 36 mahasiswa berdasarkan proporsi dari *tabel-isaac dan michael* adalah taraf signifikansi

5% dari jumlah populasi yang berjumlah 40 mahasiswa. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah *simple random sampling* yang berarti sampel yang diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi. Data ini meliputi jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat skala prioritas dalam menilai variabel ekonomi (pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengangguran dan tingkat ketimpangan) dengan teknik pembuatan ranking atau disebut *card sorting*.

Tujuan dari mendapatkan data ini untuk mengetahui bobot yang diperoleh dari masing-masing variabel ekonomi dengan menggunakan perhitungan *importance weighting factor*. Perhitungan bobot tersebut digunakan karena adanya perbedaan kualitas antara penurunan ketimpangan, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, penurunan inflasi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan angka yang sama.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari data yang terbitkan oleh suatu instansi tertentu dan peneliti tidak berperan aktif dalam pengumpulan data tersebut. Data sekunder tersebut diperoleh dengan menggunakan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti juga menggunakan data yang diperoleh dari internet.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kinerja kepala daerah petahana dan non petahana dalam sektor ekonomi 33 provinsi di Indo-

nesia tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum dan sumber pemberitaan *online*. Sedangkan data lain yang akan dianalisis adalah data mengenai kinerja ekonomi kader partai politik 33 provinsi di Indonesia pada tahun penelitian yaitu tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Definisi Operasional Variabel

1) **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah persentase kenaikan jumlah PDRB harga konstan dari tahun sekarang dengan jumlah PDRB harga konstan dari tahun sebelumnya. Satuan yang digunakan dalam variabel pertumbuhan ekonomi adalah satuan persen.

2) **Inflasi**

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Satuan yang digunakan dalam variabel inflasi adalah persen.

3) **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya dalam suatu wilayah. Satuan yang digunakan dalam variabel tingkat pengangguran terbuka adalah satuan persen.

4) **Pengangguran**

Pengangguran adalah jumlah orang yang berada dalam kategori angkatan kerja namun belum mempunyai pekerjaan. Satuan yang digunakan dalam variabel pengangguran adalah satuan jumlah/orang.

5) **Laju Pengangguran**

Laju pengangguran adalah persentase selisih baik kenaikan atau penurunan jumlah pengangguran pada tahun tertentu pada suatu wilayah. Perhitungan laju pengangguran dihitung dengan cara mengurangi jumlah pengangguran pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya lalu dibagi dengan jumlah pengangguran tahun sebelumnya dikali dengan seratus persen sehingga hasil dari perhitungan laju pengangguran tersebut menggunakan satuan persen.

6) **Tingkat Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah orang miskin yang berarti keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan dengan total jumlah penduduk di suatu daerah. Satuan yang digunakan dalam variabel tingkat kemiskinan adalah satuan persen.

7) **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah jumlah orang miskin yang di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik sedangkan satuan variabel kemiskinan menggunakan satuan jumlah/orang.

8) **Laju Kemiskinan**

Laju kemiskinan adalah persentase selisih baik kenaikan atau penurunan jumlah kemiskinan pada tahun tertentu pada suatu wilayah. Perhitungan laju kemiskinan dihitung dengan cara mengurangi jumlah kemiskinan pada tahun tertentu dengan

tahun sebelumnya lalu dibagi dengan jumlah kemiskinan tahun sebelumnya dikali dengan seratus persen. Sehingga hasil dari perhitungan laju kemiskinan tersebut menggunakan satuan persen.

9) Indeks Gini/Tingkat Ketimpangan

Indeks gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan di distribusikan di antara populasi. Indeks gini memiliki kisaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

10) Laju Tingkat Ketimpangan/Laju Indeks Gini

Laju tingkat ketimpangan adalah persentase selisih baik kenaikan atau penurunan tingkat ketimpangan pada tahun tertentu pada suatu wilayah. Perhitungan laju tingkat ketimpangan dihitung dengan cara mengurangi tingkat ketimpangan pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya lalu dibagi dengan tingkat ketimpangan tahun sebelumnya dikali dengan seratus persen sehingga hasil dari perhitungan laju tingkat ketimpangan tersebut menggunakan satuan persen.

11) Pergantian Kepala Daerah Dati I (Gubernur)

Pergantian kepala daerah dati I (gubernur) adalah suatu proses politik di mana suatu da-

erah yang mengalami pergantian kepala daerah tingkat provinsi yang disebabkan masa jabatan yang telah habis atau disebabkan oleh hal lain. Penelitian ini membagi pergantian kepala daerah menjadi dua kategori, yaitu kepala daerah petahana dan kepala daerah yang baru (non petahana).

12) Dominasi Partai Politik

Dominasi partai politik adalah besarnya kekuasaan yang dimiliki suatu partai politik di suatu wilayah yang dilihat dari sisi eksekutif dan legislatif dengan melihat sudut pandang kuantitatif.

Metode Analisis Data

1) Paired Sample T-Test

Analisis uji beda perbandingan rata-rata saling berpasangan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis *paired sample t-test*. Terdapat dua langkah dalam menggunakan analisis *paired sample t-test* yaitu sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik (statistik inferensial). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *one-sample kolmogorov-smirnov test*.

b. Pengujian Analisis Paired Sample T-Test

Pengujian ini untuk mengetahui apakah ada perubahan secara signifikan antara sebelum dan setelah terjadi perlakuan atau kejadian tertentu. Jika nilai signifikansi pada tabel kurang dari 0,05 dapat diartikan bahwa ter-

jadi perubahan signifikan pada variabel tertentu. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi perubahan yang signifikan pada variabel tertentu.

2) Indeks Performa Ekonomi

Terdapat beberapa tahapan dalam menghitung indeks performa ekonomi sebagai berikut :

a. Pembuktian Keterikatan Antar Variabel

Dalam membuktikan bahwa kelima variabel ekonomi tersebut tidak berhubungan secara signifikan satu dengan yang lain dengan analisis korelasi pearson. Analisis ini untuk membuktikan bahwa di antara variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, laju pengangguran, laju kemiskinan dan laju tingkat ketimpangan tidak selalu berkorelasi.

b. Menghitung Tingkat Kepentingan Variabel

Setelah dipastikan kelima variabel tersebut tidak memiliki hubungan secara signifikan, maka langkah selanjutnya adalah mencari perhitungan proporsi atau bobot pada setiap variabel untuk menentukan variabel mana yang paling penting daripada variabel yang lain. Teknik yang digunakan adalah *importance weighting factors*. Menurut Aritonang (2005), *importance weighting factors* adalah salah satu tahap analisis dalam pengujian *costumer satisfaction index* (CPI). Sebelum mencari *importance weighting factors*, langkah

pertama yang dilakukan adalah dengan menentukan *mean importance score* dengan rumus (Aritonang, 2005) :

$$MIS Y_i = \frac{\sum Y_i}{n}$$

dimana :

n : Jumlah responden
Y_i : Total nilai kepentingan suatu variabel

Setelah nilai *mean importance score* ditemukan, lalu langkah selanjutnya adalah menentukan *importance weighting factors* kelima variabel tersebut dengan rumus (Aritonang, 2005):

$$IWF = \frac{MIS - I}{Total MIS - I}$$

dimana :

IWF : *Weighting Factors*
MIS-I : Rata-rata tingkat kepentingan suatu variabel

c. Menghitung Besarnya Dominasi Partai Politik di Suatu Provinsi

Dominasi partai politik digunakan untuk mengetahui komposisi suatu partai politik di suatu wilayah baik dalam lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.

a) Perhitungan Dominasi Partai politik Suatu Provinsi di Lembaga Legislatif

Perhitungan ini digunakan untuk menentukan besaran persentase kekuatan atau peranan suatu partai politik di legislatif. Sumber data yang digunakan dalam per-

hitungan ini adalah jumlah kader suatu partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah suatu provinsi tahun 2009 dan jumlah total Dewan Perwakilan Rakyat Daerah suatu provinsi tahun 2009. Perhitungan tersebut dapat dihitung dengan rumus :

$$DoL = \frac{\sum PP}{\sum DPRD} \times 100\%$$

dimana :

- DoL : Dominasi partai politik di legislatif
 $\sum PP$: Jumlah kursi yang diraih suatu partai politik
 $\sum DPRD$: Total kursi yang tersedia dalam DPRD Provinsi

b) Perhitungan Dominasi Partai Politik di Lembaga Eksekutif

Perhitungan ini digunakan untuk menentukan besaran persentase kekuatan atau peranan suatu partai politik di eksekutif. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah partai politik pendukung atau pengusung kepala daerah di suatu provinsi yang mempunyai masa jabatan di tahun penelitian yaitu tahun 2010 sampai dengan 2014 dan jumlah kader suatu partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah suatu provinsi tahun 2004 dan 2009. Perhitungan tersebut dapat dihitung dengan rumus (Peraturan Komi-

si Pemilihan Umum No 68 Tahun 2009) :

$$DoE = \frac{\%PPE}{\sum \%PPE} \times 100\%$$

dimana :

- DoE : Dominasi partai politik di eksekutif
 $\%PPE$: Persentase partai politik pendukung eksekutif
 $\sum \%PPE$: Jumlah persentase semua partai politik pendukung eksekutif

c) Perhitungan Dominasi Partai Politik di Suatu Provinsi

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui besaran dominasi atau peranan partai politik di suatu provinsi. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah hasil perhitungan dominasi suatu partai politik di tingkat legislatif dan eksekutif diatas sehingga perhitungan tersebut dapat dihitung dengan rumus (Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah) :

$$Do = \frac{DoL + DoE}{2}$$

dimana :

- Do : Dominasi partai politik di suatu daerah
DoL : Dominasi partai politik di legislatif
DoE : Dominasi partai politik di eksekutif

- d. Menghitung Selisih Variabel Ekonomi Tiap Provinsi dengan Variabel Ekonomi Nasional

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui selisih antara besaran variabel ekonomi suatu provinsi dengan variabel ekonomi nasional. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, laju kemiskinan, laju pengangguran dan laju tingkat ketimpangan nasional dan 33 provinsi di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dapat dihitung dengan rumus :

$$Z = X - Y$$

Di mana :

- Z : Besar selisih antara variabel ekonomi di suatu provinsi dengan nasional
X : Besar variabel ekonomi di suatu provinsi
Y : Besar variabel ekonomi nasional

Perhitungan ini hanya berlaku bagi variabel ekonomi yang mempunyai asumsi bahwa semakin besar variabel ekonomi tersebut akan berdampak ke ekonomi yang lebih baik. Misalnya variabel ekonomi pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, PDB dan lain-lain. Sedangkan asumsi ekonomi berlaku terbalik dari yang di atas seperti variabel inflasi, laju pengangguran, laju kemiskinan dan lain-lain, maka akan menggunakan rumus :

$$Z = (X - Y). (-1)$$

Di mana :

- Z : Besar selisih antara variabel ekonomi suatu provinsi dengan nasional
X : Besar variabel ekonomi suatu provinsi
Y : Besar variabel ekonomi nasional

- e. Menghitung Indeks Performa Ekonomi Suatu Provinsi (Satu Tahun)

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui performa ekonomi suatu provinsi dalam jangka waktu satu tahun. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah *importance weighting factor* atau bobot yang diperoleh masing-masing variabel ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, laju kemiskinan, laju pengangguran dan laju tingkat ketimpangan nasional dan selisih variabel ekonomi antara provinsi dengan nasional 33 provinsi di Indonesia tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang telah dihitung sebelumnya. Perhitungan ini dapat dihitung dengan rumus :

$$Ip = (IWFpe \times 100) Zpe + (IWFi \times 100) Zi + (IWFp \times 100) Zp + (IWFk \times 100) Zk + (IWFig \times 100) Zeig$$

Di mana :

- Ip : Indeks performa ekonomi suatu provinsi
IWFpe: *Importance weighting factors* pertumbuhan ekonomi
IWFi : *Importance weighting factors* inflasi
IWFp : *Importance weighting factors* laju pengangguran

IWFk : *Importance weighting factors* laju kemiskinan
IWFtk : *Importance weighting factors* laju ketimpangan
Zpe : Besar selisih antara pertumbuhan ekonomi provinsi dengan nasional
Zi : Besar selisih antara inflasi provinsi dan nasional
Zp : Besar selisih antara pertumbuhan pengangguran provinsi dan nasional
Zk : Besar selisih antara pertumbuhan kemiskinan provinsi dan nasional
Zig : Besar selisih antara pertumbuhan indeks gini provinsi dan nasional

f. Menghitung Indeks Performa Tiap Partai Politik di Suatu Provinsi

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui performa ekonomi suatu partai politik di suatu provinsi dalam jangka waktu satu tahun. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah dominasi partai politik yang telah dihitung dengan indeks performa ekonomi suatu provinsi yang juga telah dihitung di atas. Perhitungan ini dapat dihitung dengan rumus :

$$IPEPPP = (Do \times Ip) / 100$$

Di mana :
IPEPPP : Indeks performa ekonomi partai politik tingkat provinsi di suatu provinsi
Do : Dominasi partai politik di suatu provinsi

Ip : Indeks performa ekonomi suatu provinsi

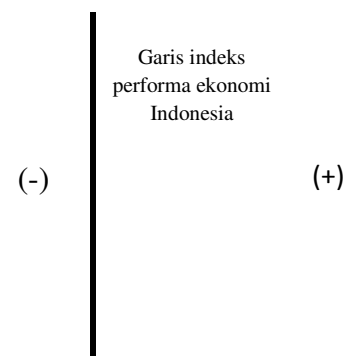
g. Menghitung Indeks Performa Tiap Partai Politik

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui performa ekonomi suatu partai politik dalam tahun penelitian. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah indeks performa tiap partai politik di suatu provinsi dan jumlah provinsi dan jumlah tahun yang terdapat kader suatu partai politik. Perhitungan ini dapat dihitung dengan rumus :

$$IPEPPN = \frac{\sum IPEPPP}{\sum KPP}$$

Di mana :
IPEPPN : Kalkulasi indeks performa ekonomi partai politik tingkat provinsi
 $\sum IPEPPP$: Total indeks performa ekonomi partai politik tingkat provinsi di tiap provinsi
 $\sum KPP$: Jumlah provinsi dan tahun yang terdapat kader dari partai politik yang diteliti

Gambar 1
Tipologi Indeks Performa Ekonomi Partai Politik Tingkat Regional (Provinsi)



Gambar 3.1 menunjukkan bahwa jika indeks performa ekonomi suatu partai politik tingkat provinsi berada disebelah kanan garis, maka dapat dikatakan performa ekonomi suatu partai politik di tingkat provinsi berada diatas indeks performa ekonomi nasional. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja partai politik di tingkat provinsi pada tahun 2010-2014 sudah memuaskan dalam membangun kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi melalui kebijakan yang dibuatnya. Sebaliknya jika indeks performa ekonomi suatu partai politik tingkat provinsi berada di sebelah kiri garis, maka dapat dikatakan performa ekonomi suatu partai tingkat provinsi berada dibawah indeks performa ekonomi nasional. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja partai politik di tingkat provinsi pada tahun 2010-2014 belum memuaskan dalam membangun kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi melalui kebijakan yang dibuatnya.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Beda

Tabel 1
Hasil Pengujian Uji Beda Paired Sample T-Test SPSS 16

Variabel	Petahana		Non Petahana	
	Sebelum dan Setelah	Sig. (2-tailed)	Sebelum dan Setelah	Sig. (2-tailed)
Pen. Ekonomi	8.1500		6.8400	
Inflasi	6.2550	.077	6.8789	.375
IPZ	6.4333	.682	6.5556	.747
Tingkat Kemiskinan	5.5228	.029	6.2056	.896
Tingkat Kemiskinan	12.2072		13.7214	
Angka Harapan	11.9256	.326	13.7770	.022
Angka Harapan	1.177		.8824	
Ketercapaian	1.041	.092	.7851	.941

Sumber: Output SPSS 16 (data simulasi)

Dari tabel 1 dapat dianalisis bahwa ternyata kepala daerah yang baru terpilih dapat mengurangi tingkat kemiskinan pada tahun pertamanya secara signifikan karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Pengalaman yang dimiliki kepala daerah petahana ternyata tidak memberikan perbedaan yang besar terhadap kondisi tingkat kemiskinan suatu daerah dibandingkan dengan semangat dari kepala daerah baru yang berhasil memberikan perbedaan yang signifikan terhadap kondisi tingkat kemiskinan suatu daerah.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah penting dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, seseorang yang ingin mencalonkan menjadi kepala daerah wajib untuk memasukan program kerja kemiskinan sebagai program kerja prioritas. Itu dibuktikan dengan 14 kepala daerah yang baru yang rata-rata menyertakan program peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat ke dalam visi misi mereka. Dalam hal ini, hubungan antara peningkatan sumber daya manusia dengan menurunnya kemiskinan dapat diartikan sebagai bantuan dari pemerintah bagi orang miskin untuk dapat bersekolah dan mendapatkan sarana kesehatan tanpa memikirkan biaya sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat dengan adanya jaminan untuk sekolah sampai setinggi mungkin dan mendapatkan jaminan untuk dapat hidup secara sehat. Setelah dipastikan terpilih menjadi kepala daerah, semangat untuk menjalankan programnya masih tinggi karena masih termotivasi untuk melaksanakan janji yang telah diucapkan saat program kampanye. Sehingga dalam tabel terlihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan saat dipimpin kepala daerah yang baru atau non petahana. Dengan pernyataan tersebut, keberhasilan ke-

pala daerah non petahana dalam mengatasi kemiskinan menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut lebih berperan dari faktor internal yaitu kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan daerah

Sebaliknya, terpilihnya kepala daerah petahana ternyata dapat mengubah tingkat pengangguran terbuka secara signifikan karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Pengalaman yang dimiliki kepala daerah petahana ternyata memberikan perbedaan yang signifikan terhadap kondisi tingkat pengangguran terbuka suatu daerah dibandingkan dengan semangat dari kepala daerah baru yang ternyata tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap kondisi tingkat pengangguran terbuka suatu daerah.

Terpilihnya kembali seorang kepala daerah menunjukkan bahwa masyarakat percaya terhadap seorang kepala daerah dan dianggap sebagai *reward* dari masyarakat sebagai akibat dari kinerja baik dari seorang kepala daerah yang membuat kondisi suatu daerah menjadi kondusif sehingga menciptakan citra baik di mata investor dan mempengaruhi investasi yang akan masuk ke dalam suatu daerah. Menurut Dumairy (1996) dan Jhingan (1998), pengaruh pencitraan yang baik dari suatu daerah dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di suatu daerah menentukan besarnya jumlah investasi. Semakin besarnya investasi yang masuk di suatu daerah akan membuat banyak lapangan pekerjaan sehingga pengangguran yang terdapat dalam suatu daerah akan berkurang. Hasil tersebut diperlihatkan dengan menurunnya secara signifikan tingkat pengangguran terbuka daerah yang dipimpin oleh petahana. Dengan pernyataan tersebut, keberhasilan kepala daerah petahana dalam mengatasi masalah pengangguran menunjukkan

bahwa keberhasilan tersebut lebih berperan dari faktor eksternal yaitu faktor modal yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang menginvestasikan uang kedalam suatu daerah.

Perbandingan Performa Ekonomi Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Regional

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan untuk mengukur kinerja kader partai politik di provinsi.

1) Uji Hubungan Antar Variabel

Hasil dari analisis korelasi pearson adalah :

Tabel 2
Uji Korelasi antar Lima Variabel Ekonomi Tahun 2012

		perteko	rtas	peng	lkomp	l.k
perteko	Pearson Correlation	1	.015	.109	-.087	-.105
	Sig. (2-tailed)		.939	.373	.522	.562
	N	33	33	33	33	33
rtas	Pearson Correlation	.015	1	.072	.164	.228
	Sig. (2-tailed)	.939		.800	.316	.201
	N	33	33	33	33	33
peng	Pearson Correlation	.109	.072	1	.111	-.081
	Sig. (2-tailed)	.570	.800		.313	.600
	N	33	33	33	33	33
lkomp	Pearson Correlation	-.087	-.164	.111	1	.000
	Sig. (2-tailed)	.679	.316	.338		.998
	N	33	33	33	33	33
l.k	Pearson Correlation	-.105	-.228	-.081	.000	1
	Sig. (2-tailed)	.582	.201	.600	.998	
	N	33	33	33	33	33

Sumber : Output SPSS 16 (data diolah)

Dari tabel 2 tersebut dapat dijelaskan bahwa dari kelima variabel tersebut, tidak ada keterkaitan antara kelima variabel tersebut pada tahun 2012 karena tidak ada hubungan antar variabel yang signifikansinya di bawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa satu variabel tidak dapat merepresentasikan variabel lain sehingga penggunaan lima variabel ini tepat digunakan sebagai pengukur performa ekonomi regional.

2) Hasil Tingkat Kepentingan Variabel

Hasil di bawah merupakan hasil jejak pendapat yang telah

ditentukan tentang variabel manakah di antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan yang paling diprioritaskan dalam menilai perekonomian daerah ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3
Perhitungan Importance Weighing Factors

No	Variabel	Importance Weighing Score
1	Pertumbuhan Ekonomi	0,1828
2	Inflasi	0,1620
3	Pengangguran	0,2444
4	Kemiskinan	0,2241
5	Tingkat Ketimpangan	0,2167

Sumber : Hasil Survei (Data diolah)

Hasil survei yang tersaji pada tabel menunjukkan bahwa rata-rata informan menganggap masalah pengangguran adalah masalah yang harus segera diatasi sehingga dapat dikatakan bahwa suatu pemerintahan yang berhasil mengurangi pengangguran sebesar-besarnya, maka akan semakin bagus kinerja ekonomi yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan.

3) Analisis Data dan Pembahasan Indeks Performa Ekonomi

Berikut adalah indeks performa ekonomi yang dihasilkan oleh 44 kader partai politik di lingkup provinsi pada tahun 2010-2014.

Tabel 4
Indeks Performa Ekonomi 44 Partai Politik Tingkat Regional (Provinsi) Peserta Pemilu 2009

Nama Partai	Indeks Performa Ekonomi	Nama Partai	Indeks Performa Ekonomi
AKB	16,15	PKB	1,81
Demokrat	-1,42	PK	-0,12
Gerakan	-0,32	PKS	2,33
PAN	-4,22	PKS	-4,18
PPP	0,74	PKS	0,78
PKS	0,67	PKS	1,49
PKS	-0,11	PKS	-4,38
PKS	-0,32	PKS	-1,31
PKS	1,01	PKS	-0,91
PKS	1,07	PKS	0,78
PKS	0,71	PKS	0,94
PKS	-0,01	PKS	Tidak Teridentifikasi
PKS	-0,24	PKS	-0,33
PKS	-0,32	PKS	-0,33
PKS	0,27	PKS	0,01
PKS	0,08	PKS	0,51
PKS	-1,07	PKS	Tidak Teridentifikasi
PKS	-0,11	PKS	Tidak Teridentifikasi
PKS	-0,23	PKS	Tidak Teridentifikasi
PKS	0,70	PKS	Tidak Teridentifikasi
PKS	0,04	PKS	Tidak Teridentifikasi
PKS	-0,11	PKS	Tidak Teridentifikasi

Sumber : Pengolahan Data Output Microsoft Excel 2013

Dapat dilihat bahwa di antara 44 partai politik yang mengikuti pemilu tahun 2009, tujuh partai politik mempunyai nilai indeks yang “tidak teridentifikasi” karena ketujuh partai tersebut tidak mempunyai wakil di legislatif dan eksekutif tingkat provinsi pada tahun 2010-2014. Tabel tersebut juga menunjukkan hanya tiga partai politik yang mempunyai nilai indeks positif sedangkan 34 partai politik lainnya mempunyai mempunyai nilai indeks negatif.

Indeks paling rendah yang diraih oleh Partai Aceh, Partai Buruh dan Partai PDIP menunjukkan bahwa kader dari ketiga partai politik tersebut kurang bisa memanfaatkan besarnya kekuasaan dalam lembaga eksekutif dan legislatif yang diperoleh untuk mengangkat performa ekonomi di daerah masing-masing yang berhasil dikuasanya.

Banyaknya indeks partai politik yang bernilai negatif menunjukkan bahwa performa ekonomi yang dihasilkan oleh kader partai politik di daerah yaitu dalam lingkup provinsi masih kurang memuaskan dibandingkan performa ekonomi kader partai politik di lingkup nasional. Sehingga kinerja kader partai politik di tingkat provinsi pada tahun 2010-2014 dapat dikatakan belum memuaskan dalam membangun kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi melalui kebijakan yang dibuatnya.

Hasil penelitian ini didukung dengan pernyataan dari Wildanshah (2014) yang mengutarakan bahwa “Peran partai-partai politik nasional di tingkatan lokal pada saat ini lebih

mengurus kepentingan golongan sendiri dan melakukan manuver politik hanya untuk jabatan dan pendapatan”. Pernyataan itu diperkuat dengan penelitian Syamsudin Haris di Kabupaten Kupang dan Ende yang menemukan praktik partai nasional di tingkatan lokal yang gagal menjadi jembatan aspirasi dan kepentingan rakyat, karena kepentingan partai tidak lebih dari kepentingan rakyat. Contohnya adalah kader-kader yang masuk ke lembaga DPRD cenderung membuat kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang tidak relevan bisa berujung dengan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Timbulnya KKN di daerah-daerah banyak dikarenakan pengawasan yang kurang maksimal terutama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jarak yang jauh membuat pengawasan tersebut kurang maksimal sehingga masih terdapat celah bagi pelaku untuk berbuat KKN. Hamid (2013) mengutarakan bahwa pendapat dan studi yang ada lebih cenderung berpandangan bahwa korupsi justru memperlambat atau menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pendapatan masyarakat.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

Kesimpulan Umum

- 1) Tidak ada perbedaan kinerja antara kepala daerah petahana dengan non petahana.
- 2) Kinerja partai politik di tingkat provinsi pada tahun 2010-2014 belum memuaskan dalam mem-

bangun kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi melalui kebijakan yang dibuatnya.

Kesimpulan Khusus

- 1) Variabel kemiskinan adalah variabel yang tingkat perubahannya paling signifikan ketika terjadi pergantian kepala daerah tingkat provinsi. Itu menyatakan bahwa kepala daerah yang baru terpilih berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka adalah variabel yang tingkat perubahannya paling signifikan ketika petahana terpilih kembali menjadi kepala daerah. Itu menyatakan bahwa kepala daerah petahana berhasil dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka dalam masa kepemimpinan periode kedua.
- 2) Performa partai politik tingkat provinsi terhadap performa ekonomi regional dikategorikan rendah karena hanya tiga partai politik peserta pemilu tahun 2009 yang mempunyai nilai performa ekonomi yang nilainya mencapai angka positif (+).
- 3) Partai Aceh dan Partai Buruh adalah partai politik yang mempunyai performa ekonomi paling rendah dalam tingkat provinsi sedangkan PPNU adalah partai politik yang mempunyai performa ekonomi paling tinggi dalam tingkat provinsi.
- 4) Sebaliknya, jika seorang kepala daerah dilantik sebelum bulan Juli pada tahun tertentu, maka kinerja ekonomi yang akan dihitung adalah kinerja ekonomi pada tahun tersebut.

Saran

- 1) Diharapkan kepada kepala daerah untuk lebih menggiatkan program untuk memacu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan ting-

kat ketimpangan. Program yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi seperti kemudahan izin usaha, pemberian kredit usaha. Sedangkan program yang dapat menekan inflasi seperti operasi pasar di waktu yang tepat dan program untuk menekan angka ketimpangan dengan pemerataan dan perbaikan infrastruktur terutama di daerah yang menjadi sumber ketimpangan daerah.

- 2) Diharapkan untuk diadakan *fit and proper test* bagi calon kepala daerah dan calon wakil rakyat untuk lebih mematangkan proses seleksi pencalonan kepala daerah dan wakil rakyat.
- 3) Diharapkan untuk partai politik agar lebih mengarahkan kader sesuai dengan daerah asal karena kader yang sesuai dengan daerah asal mempunyai semangat kedaerahannya yang tinggi dan lebih mengerti situasi, kondisi dan permasalahan daerah asalnya yang menyebabkan potensi meningkatnya kondisi ekonomi jauh lebih besar. Saran ini ada karena mengingat dalam perspektif kinerja ekonomi menunjukkan indeks performa ekonomi partai politik tingkat provinsi kebanyakan bernilai minus.
- 4) Kepada masyarakat agar dapat memilih kepala daerah yang lebih terbukti dalam kinerja, bukan berdasarkan latar belakang partai politik ataupun fisik dan diharapkan jangan melihat calon kepala daerah tersebut dari sisi petahana atau tidak, karena pada dasarnya baik petahana maupun tidak, berdasarkan hasil statistik hasil kinerjanya secara keseluruhan tidak berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik Edisi 2*. Jakarta : Salemba Humanika.

Aco, Hasanudin. (2011), 16 November). Pelantikan Gubernur Sulbar Ditetapkan 14 Desember 2011. *TRIBUN NEWS*. Diperoleh 22 November 2015, <http://www.tribunnews.com/regional/2011/11/16/pelantikan-gubernur-sulbar-ditetapkan-14-desember-2011>

Adhi, Wisnu. (2013, 22 Agustus). Sejumlah Menteri akan Hadiri Pelantikan Ganjar Pranowo. *ANTARA NEWS*. Diperoleh 22 November 2015, <http://www.antaranews.com/berita/391798/sejumlah-menteri-akan-hadiri-pelantikan-ganjar-pranowo>

Adrianus, Yohanes. (2013). Mendagri : Gubernur agar Bangun Sinergitas. *ANTARA NEWS*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://makassar.antaranews.com/berita/48340/mendagri--gubernur-agar-bangun-sinergisitas>

Aisyah, Andi. (2008). 1.500 Polisi Amankan Pelantikan Gubernur Sulsel. *OKEZONE*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://news.okezone.com/read/2008/04/07/1/98379/1-500-polisi-amankan-pelantikan-gubernur-sulsel>

Algifari. 2013 . *Statistika Deskriptif Plus untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN .

Ali. (2015). *Pembahasan Mengenai Pengertian Kepala Daerah, Tugas Kepala Daerah dan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah*. Diperoleh 18 Februari 2016, dari <http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-kepala-daerah-tugas-dan.html>

_____. (2015). *Pengertian Ilmu Politik Menurut Pakar*. Diperoleh 18 Februari 2016 dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-ilmu-politik-menurut-pakar.html>

Ansam, Hermanto. (2014). Kamis, Jadwal Pelantikan Anna Maamun - Andi Rachman sebagai Gubri 2013-2018 Ditetapkan. *GO RIAU*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.goriau.com/berita/riau/kamis-jadwal-pelantikan-annas-maamun-andi-rachman-sebagai-gubri-2013-2018-ditetapkan.html>

ANTARA NEWS. (2006.). Gubernur Gorontalo Dilantik Januari 2007. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.antaranews.com/berita/49689/gubernur-gorontalo-dilantik-januari-2007>

_____. (2010). Pelantikan Gubernur. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.antaranews.com/foto/10760/pelantikan-gubernur>

_____. (2011, 17 Juni). Longki Soedarto Resmi Pimpin Sulteng. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.antaranews.com/berita/263530/longki-soedarto-resmi-pimpin-sulteng>

Aritonang, R.L. 2005. *Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : Gramedia.

Arrazie, Nurochman. (2009). Enam Ribu Warga Lampung Saksikan Pelantikan Sjachroedin. *TEMPO*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2009/06/02/058179357/enam-ribu->

warga-lampung-saksikan-pelantikan-sjachroedin

Arsyad, Lincoln. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN.

_____. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2011. *Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Badrudin, Rudy. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Bakhori, Syaipul. (2005). Gubernur Jambi Dilantik. *TEMPO*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://tempo.co.id/hg/nusa/sumatera/2005/08/03/brk,20050803-64765,id.html>

Bakir, Zainab dan Manning, Cris. (1984). *Angkatan Kerja Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Baldwin, Robert E. (1986). *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang*. Terjemahan oleh ST. Dianjung. Jakarta : Bina Aksara.

Basari, Hasan . (1988). *Kekuasaan : Sebuah Analisis Sosial Baru* . Jakarta : Obor Indonesia.
BERITA BALI. (2013, 29 Agustus). Dilantik Mendagri, Mangku Pastika Kembali Pimpin Bali. Diperoleh 22 Noveber 2015, dari <http://www.beritabali.com/read/2013/08/29/201308290007/Dilantik-Mendagri-Mangku-Pastika-Kembali-Pimpin-Bali.html>

BERITA INDONESIA. (2007). Ratu Memimpin Banten. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.beritaindonesia.co.id/daerah/668-ratu-memimpin-banten>

Boediono. (1982). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Cahyat, Ade, Gönner, Christian & Haug, Michaela. (2007). *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*. Bogor : Center for International Forestry Research.

Dalle, Rumbadi. (2005). Ismeth Abdullah Dilantik Jadi Gubernur Kepulauan Riau. *TEMPO*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://tempo.co.id/hg/nusa/sumatera/2005/08/19/brk,20050819-65464,id.html>

Deliarnov. (1995). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta : UI Press.

DETIK. (2006). Demo Ratusan Warga Iringi Pelantikan Gubernur Sulteng. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://news.detik.com/berita/564920/demo-ratusan-warga-iringi-pelantikan-gubernur-sulteng>

_____. (2007). Selamat dan Harapan Disampaikan kepada Irwandi-Nazar. Diperoleh 22 November 2015, dari us.hot.detik.com/read/2007/02/08/162143/739957/10/selamat-dan-harapan-disampaikan-kepada-irwandi-nazar

_____. (2007). Ratusan Tamu Pelantikan Fauzi Bowo Prijanto Padati DPRD. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://news.detik.com/berita/838928/ratusan-tamu-pelantikan-fauzi-bowo-prijanto-padati-dprd>

_____. (2008). Mendagri Lantik Rusli Zainal. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://news.detik.com/berita/1040692/mendagri-lantik-rusli-zainal-sebagai-gubernur-riau>

_____. (2012). Mantan Petinggi GAM Resmi Jadi Gubernur NAD 2012-2017. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://news.detik.com/berita/1950488/mantan-petinggi-gam-resmi-jadi-gubernur-nad-2012-2017?9911012=>

De Fortuna, Jems. (2008). Pejabat Bupati Dilarang Mencalonkan Diri. *TEMPO*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://tempo.co.id/hg/nusa/nusatenggara/2008/07/16/brk,20080716-128297,id.html>

Dosen Pendidikan. (2015). 6 Pengertian dan Macam-Macam Sistem Ekonomi Menurut Para Ahli. Diperoleh 28 Oktober 2015, dari <http://www.dosenpendidikan.com/6-pengertian-dan-macam-macam-sistem-ekonomi-menurut-para-ahli/>

Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga

Eachern, William. A . Mc. (2000). *Makro Ekonomi : Pendekatan Temporer*. Terjemahan Triandaru, Sigit. Jakarta : Salemba Empat.

Esmara, Hendra. (Ed.). (1985). *Politik, Perencanaan Pembangunan : Teori,*

Kebijaksanaan dan Prospek. Padang. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik. Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di era Demokrasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fitrinsyah, Ardhy. (2013). Harapan Masyarakat Paska Pelantikan Alex-Ishak. *SAYANGI*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.sayangi.com/daerah1/read/10082/harapan-masyarakat-paska-pelantikan-alex-ishak>

FOKUS. (2011). Soekarwo – Gubernur Jawa Timur Periode Tahun 2009-2014. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.newsfokus.com/?p=993>

GATRA. (2005). Ari Sigit Mengaku Teman Seperguruan Gubernur Kalsel. Diperoleh 22 november 2015, dari <http://arsip.gatra.com/2005-08-05/artikel.php?id=87046>

Guna, Anwar Sadat. (Ed). (2010). Isu Demo Warnai Pelantikan Teras Narang. *TRIBUNNEWS*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.tribunnews.com/regional/2010/08/03/isu-demo-warnai-pelantikan-teras-narang>

Hamid, Edy Suandi. (2013). *Sistem Penyelenggara Negara Anti Korupsi dan Berbasis Keadilan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Handoko, Agustinus. (2013). Cornelis dan Christiandy Resmi Menjabat Lagi. *KOMPAS*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://regional.kompas.com/read/2013/>

01/14/15434526/Cornelis.dan.Christiandy.Resmi.Menjabat.Lagi

Haris, Syamsudin. (2014). *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Indonesia Provinces. Diperoleh 22 November 2015, dari http://www.worldstatesmen.org/Indonesia_prov.html

Isjwara, F. (1995). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Bina Cipta.

Jhingan, M.L. (1988). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan oleh D. Guritno. Jakarta : Rajawali Pers.

_____. (1996). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

JPPN. (2008) Mendagri Akhirnya Lantik Gubernur Malut. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.jpnn.com/read/2008/09/30/7673/Mendagri-Akhirnya-Lantik-Gubernur-Malut>

_____. (2010). Lantik Dua Rudy, Mendagri Dorong Rekonsiliasi. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.jpnn.com/read/2010/08/08/69701/Lantik-Dua-Rudy,-Mendagri-Dorong-Rekonsiliasi->

Juanda, Nawawi. (2012). *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*. Makassar : CV Menara Intan.

Julikawati, Phesi Ester. (2010). Agusrin Dilantik Sebagai Gubernur Bengkulu Besok. *TEMPO*. Diperoleh 22 November 2015, dari <https://m.tempo.co/read/news/2010/11>

/28/179295114/agusrin-dilantik-
sebagai-gubernur-bengkulu-besok

Kansil, C.S.T . (1981). *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru.

Karana. (2005). Teras Narang dilantik Menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. *TEMPO*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://tempo.co.id/hg/nusa/kalimantan/2005/08/04/brk,20050804-64832,id.html>

Kartiwan, Iwan. (2008). Mendagri Lantik Gubernur dan Wagub terpilih 2008. *DISKOMINFO PROVINSI JAWA BARAT*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://diskominfo.jabarprov.go.id/index.php/mendagri-lantik-gubernur-dan-wagub-terpilih-2008/>
KEMENDAGRI NEWS. (2008, 5 Juni). 2.000 Undangan akan Hadiri Pelantikan Syamsul Arifin. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.kemendagri.go.id/news/2008/06/05/2000-undangan-akan-hadiri-pelantikan-syamsul-arifin>

_____. (2010). Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2013-2018. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.kemendagri.go.id/news/2013/12/20/pelantikan-gubernur-dan-wakil-gubernur-kaltim-2013-2018>

_____. (2013). Mendagri Lantik Gubernur Sultra Periode 2013-2018. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.kemendagri.go.id/news/2013/02/19/mendagri-lantik-gubernur-sultra-periode-2013-2018>

Komisi Pemilihan Umum. (2008). Peraturan Komisi Pemilihan Umum

No 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum : Jakarta.

_____. (2009). Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum : Jakarta.

_____. (2010). *Pemilu 2009 dalam Angka*. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum.

KOMPAS. (2008). Ribuan Pendukung dari Daerah Ramaikan Pelantikan Gubernur Kalbar. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://nasional.kompas.com/read/2008/01/14/1117520/ribuan.pendukung.dari.daerah.ramaikan.pelantikan.gubernur.kalbar>

_____. (2008). Besok, Nur Alam Saleh Lasat Dilantik jadi Gubernur Sultra. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://nasional.kompas.com/read/2008/02/17/13394684/besok.nur.alam-saleh.lasata.dilantik.jadi.gubernur.sultra>

_____. (2008). Alex Noordin-Eddy Yusuf Dilantik. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://nasional.kompas.com/read/2008/11/07/20181328/alex.noordin-eddy.yusuf.dilantik>

_____. (2008). Made Mangku Pastika Dilantik Hari Ini. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://nasional.kompas.com/read/2008/08/28/06595794/made.mangku.pastika.dilantik.hari.ini>

_____. (2008) Pesta Rakyat Sambut Pelantikan Gubernur Bibit Waluyo. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://bola.kompas.com/read/2008/08/22/11365348/Pesta.Rakyat.Sambut.Pelantikan.Gubernur.Bibit.Waluyo>

_____. (2008). Pelantikan Awang-Farid Ibarat Proses Tertunda. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://regional.kompas.com/read/2008/12/17/0758444/Pelantikan.Awang-Farid.Ibarat.Proses.Tertunda>

Kuncoro, Mudrajat. (1997). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.

_____. (2013). *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Kurnia, Akhmad Syakir. (2012). *Public Sector Efficiency of Desentralized Local Government in Indonesia : A Political and Institutional Analysis*. Curtin University : School of Economics and Finance.

Kuswandi, Rio. (2013). Heryawan Resmi Dilantik Sebagai Gubernur Jabar. *KOMPAS*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://regional.kompas.com/read/2013/06/13/14034115/Heryawan.Resmi.Dilantik.sebagai.Gubernur.Jabar>

Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mahyudi, Ahmad. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Mankiw, Gregory. 2006. *Makroekonomi Edisi 6*. Jakarta : Erlangga.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Marius, Jelamu Ardu. (2004). *Memecahkan Masalah Pengangguran di Indonesia*. Bogor : Makalah IPB.

Maruan, Kacung. 2010. *Sistem Politik di Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta : Prenada Media Group.

MERDEKA. (2006). Anwar Adnan Saleh Amri Sanusi resmi Jadi Gubernur Wabub Sulbar. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.merdeka.com/politik/nasional/anwar-adnan-saleh-amri-sanusi-resmi-jadi-gubernur-wagub-sulbar-icqlvxa.html>

Meyer, Thomas. (2012). *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis*. Jakarta : Friedrich-Elbert-Stiftung (FES).

Michael P. Todaro. (1983). *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga* : Ghalia Indonesia.

Mikkelsen, Betha (2009). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan : Sebuah Buku Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Muhardiansyah, Yan. (2013, 14 Maret). Gatot Pujo Nugroho Dilantik jadi Gubernur Sumut. *MERDEKA*. Diperoleh 22 November 2015, dari

<http://www.merdeka.com/politik/gatot-pujo-nugroho-dilantik-jadi-gubernur-sumut.html>

Mulyanto. 2007. *Aspek dan Dimensi Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal : Kajian Atas Perarturan Perundangan Mutakhir*. Surakarta.

_____. (2014). *Perencanaan Pembangunan : Teori, Model dan Aplikasi*. Surakarta.

Munandar, Haris. (1994). *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Nanga, Muana. (2005). *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada.

Noor, Muhammad. (2012). *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta : Interpena.

Nordiawan, Deddy & Hertianti, Ayuningtyas. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.

Oy, Indra. (2013). Pelantikan Gubernur Sulsel Dijaga Ketat Polisi. *TEMPO*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/04/05/078471499/pelantikan-gubernur-sulsel-dijaga-ketat-polisi>

Pelantikan Gubernur Jambi oleh Mendagri. (2010). Diperoleh 22 November 2015, dari http://jambikota.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=638&Itemid=146

PKS NEWS. (2014, 7 Mei). Pelantikan Pasangan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Muhammad Nashir Thaib. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.pks.or.id/foto/pelantikan-pasangan-gubernur-maluku-utara-abdul-ghani-kasuba-muhammad-nashir-thaib>

Prasetyo, Agus. (2014). *Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Priliawito, Eko dan Ambarita, Banjir. (2013, 9 April). Lukas Enembe Resmi Dilantik jadi Gubernur Papua. *VIVA*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/403788-lukas-enembe-resmi-dilantik-jadi-gubernur-papua>

Profil Gamawan Fauzi, SH, MM . (2009). Diperoleh 22 November 2015, dari <http://yuhardin.scriptintermedia.com/view.php?id=4525&jenis=Umum>

Puspito, Nanang T et al. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Putong, Iskandar. (2007). *Economics, Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahardja, Prathama. (1997). *Uang dan Perbankan* . Jakarta : Rineka Cipta.

_____. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Makroekonomi dan Mikroekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Rahayu, Siwi P. (2005). Agusrin Maryono Najamuddin. *MERDEKA*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://profil.merdeka.com/indonesia/a/agusrin-maryono-najamuddin/>

RAKYAT MERDEKA. (2006). Pelantikan Barnabas Diiringi Kecaman. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2006/07/26/16235/Pelantikan-Barnabas-Diiringi-Kecaman>

Respisiusleba. (2012). Ratusan Karangan Bunga Hiasi Pelantikan Eko-Rustam. *BANGKA POS*. Diperoleh 22 November 2015, dari bangka.tribunnews.com/2012/05/07/ratusan-karangan-bunga-hiasi-pelantikan-eko-rustam

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No 125. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. (2008). Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No 51. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. (2011). Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No 8. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. (2014). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

RIMANEWS. (2014). Pasangan Said Assagaff Zeth Sahuburua akan Dilantik Jadi Gubernur Maluku Februari. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://nasional.rimanews.com/politik/read/20140131/139968/Pasangan-Said-Assagaff-Zeth-Sahuburua-Akan-Dilantik-Jadi-Gubernur-Maluku-Februari->

Rusli, Budiman. (2013). *Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung : Hakim Publishing.

Samanery, Juhri. (2008). Pelantikan Gubernur Maluku Dijaga Ketat. *LIPUTAN 6*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://news.liputan6.com/read/193110/pelantikan-gubernur-maluku-dijaga-ketat>

Samuelson & Nordhaus. (2001). *Ilmu Mikroekonomi*. Jakarta : PT Media Global Edukasi.

Saputra, Desy. (Ed). (2012). Aburizal dan Fadel Hadiri Pelantikan Gubernur Gorontalo. *ANTARA NEWS*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.antaranews.com/berita/292944/aburizal-dan-fadel-hadiri-pelantikan-gubernur-gorontalo>

Sejarah Sulawesi Utara. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://sulutprov.go.id/sejarah.html>

Setiawan, Agus. (Ed). (2010). Sarundajang Gubernur Sulut 2010-2015. *ANTARA NEWS*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://manado.antaranews.com/berita/13423/sarundajang-gubernur-sulut-2010-2015>

- Simanjuntak, Payaman J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Simbolon, Maringan Masry. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta..
- Smith, Weldon Firnando. *Sifat dan Arti Ilmu Politik*. Diperoleh 14 Februari 2016, dari sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen.
- SUARA MERDEKA. (2007). Mendagri Lantik Gubernur dan Wagub Babel. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0704/25/nas15.html>
- SUARA PEMBAHARUAN. (2012). Petinggi Golkar dan PDIP Hadiri Pelantikan Gubernur Banten. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://sp.beritasatu.com/home/petinggi-golkar-dan-pdi-p-hadiri-pelantikan-gubernur-banten/15857>
- Subaidi, Ahmad. (2013). Pelantikan gubernur NTB. *ANTARA NEWS*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1221634104/pelantikan-gubernur-ntb>
- Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik, Badan Pusat Statistik. (2015). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Subiyantoro, Heru dkk. (2004). *Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara.
- Soerjono, Soekanto. (1982). *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press
- Sukirno, Sadono. (2003). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Jakarta : PT Gramedia.
- Supriyanto, Bambang & Susilo, A.M. (2007). *Modul Laboratorium Statistika*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta : Surakarta.
- Surbakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suryanto. (Ed). (2014). Pejabat Jatuh saat Pelantikan Gubernur Lampung . *ANTARA NEWS*. Diperoleh 22 November 2015, dari <http://www.antarane.ws.com/berita/436883/pejabat-jatuh-saat-pelantikan-gubernur-lampung>
- Tahir, Arifin. (2011) *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Pustaka Indonesia Press.
- Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*.

Terjemahan oleh Haris Munandar.
Jakarta : Erlangga .

Trihendradi, Cornelius. (2005). *Step by Step SPSS 13 Analisis Data Statistik*. Yogyakarta : Andi

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945
Amandemen ke Empat, Jakarta : 2002

Yamin, Sofyan dan Heri Kurniawan.
(2014). *SPSS Complete : Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS Edisi 2*. Jakarta : Salemba Infotek

Yustika, Ahmad Erani. (2006).
Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori dan Strategi. Malang : Banyumedia

Waluyo, Andylala. (2012). Ribuan
Warga Jakarta hadir Pelantikan
Gubernur Baru. *VOA INDONESIA*.
Diperoleh 22 November 2015, dari
<http://www.voaindonesia.com/content/ribuan-warga-jakarta-hadiri-pelantikan-gubernur-baru/1526582.html>

Wibowo, Eko Ari. (2006). Ribuan
Orang hadir pelantikan Gubernur
Irian Jaya Barat. *TEMPO*. Diperoleh
22 November 2015, dari
<http://tempo.co.id/hg/nasional/2006/07/24/brk,20060724-80547,id.html>

Widjaya, Ismoko & Erinaldi. (2010).
Irwan Prayitno Dilantik Jadi Gubernur
Sumbar. *VIVA*. Diperoleh 22
November 2015, dari
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/171122-irwan-prayitno-dilantik-jadi-gubernur-sumbar/>

Wildanshah. (2015). *Representasi Asimetris : Antara Partai Nasional dan Partai Lokal*. Diperoleh 19 April 2016, dari

<https://www.selasar.com/politik/partai-nasional-dan-partai-lokal>

Zuhri, Damanhuri. (2013). Mendagri
Lantik Dr. TGH M. Zainul Majdi Jadi
Gubernur NTB. *REPUBLIKA*.
Diperoleh 22 November 2015, dari
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/09/17/mt9cif-mendagri-lantik-dr-tgh-m-zainul-majdi-jadi-gubernur-ntb>